

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Transformasi digital dalam bidang pemerintahan merupakan salah satu langkah yang diambil untuk memperbaiki mutu layanan publik serta meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi mendorong lembaga pemerintah untuk beradaptasi dengan menerapkan sistem digital agar layanan dapat dilakukan dengan lebih cepat, keterbukaan, efisiensi, dan pertanggungjawaban. Proses digitalisasi kini bukan lagi dianggap sebagai pilihan, melainkan sebagai suatu keharusan yang perlu dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu bidang yang mengalami perkembangan seiring dengan transformasi digital adalah pengelolaan arsip. Arsip memiliki fungsi penting sebagai sumber informasi, alat bukti administrasi, serta dasar dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Pengelolaan arsip yang tidak dilakukan secara tepat dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam menemukan dokumen, keterlambatan pelayanan, hingga risiko kehilangan informasi penting. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang efektif diperlukan untuk mendukung kelancaran proses administrasi pada suatu organisasi hal tersebut didukung juga oleh Yusman et al., (2024) menurutnya digitalisasi dalam administrasi tidak hanya memperbaiki efisiensi operasional,

tetapi juga memperkuat kepercayaan serta meningkatkan pengelolaan dalam sebuah organisasi. Penggunaan sistem pengarsipan konvensional masih menghadapi berbagai keterbatasan, di antaranya proses pencarian dokumen yang memerlukan waktu relatif lama, risiko kerusakan fisik arsip, serta kebutuhan ruang penyimpanan yang besar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pengelolaan arsip berbasis elektronik sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dokumen.

Setiap aspek, termasuk bidang kearsipan, memerlukan perubahan dan penyesuaian. Pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dapat mendukung pelaksanaan aktivitas kearsipan sehingga lebih efektif dan efisien (Aulianto, 2024). Tanpa pengelolaan arsip yang efektif, suatu organisasi berpotensi kehilangan jejak administratif, menghadapi keterlambatan dalam pelayanan, dan bahkan mengalami kerugian akibat hilangnya dokumen penting. Menurut penelitian Kuswantoro & Widyastuti, (2021) tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk memastikan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Transformasi pengelolaan arsip ke arah digital menjadi langkah strategis dalam mengatasi berbagai kendala yang ada. Melalui penerapan sistem kearsipan elektronik, proses pengelolaan dokumen dapat berlangsung lebih aman, efisien, dan mudah diakses.

Namun, efektifitas tidak selalu berjalan dengan baik seperti penelitian yang dilakukan oleh Zilva, (2026) terkait efektivitas aplikasi SRIKANDI

bahwa penerapan masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah adanya variasi kemampuan dan pemahaman aparatur dalam mengoperasikan aplikasi. Pegawai yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi cenderung belum mampu memanfaatkan seluruh fitur yang disediakan secara maksimal. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi administrasi pemerintahan berbasis elektronik tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem yang digunakan, tetapi juga oleh kompetensi dan kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama dalam menjalankan sistem tersebut.

Digitalisasi arsip juga sejalan dengan prinsip transparansi informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sistem elektronik, instansi pemerintah mampu menyajikan data yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang membutuhkan. Dikutip dari pernyataan resmi Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dalam Rakornas Kearsipan 2025 di Jakarta. Berisi bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui kearsipan yang transformatif. Meski begitu, ANRI masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur digital, belum terintegrasinya proses bisnis, serta perlunya peningkatan kompetensi SDM kearsipan. Menteri PANRB Rini Widyantini merekomendasikan enam langkah strategis, termasuk integrasi proses bisnis

kearsipan nasional, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas arsiparis. Kepala ANRI, Mego Pinandito, menambahkan bahwa arsip harus dimanfaatkan kembali nilai dan informasinya untuk percepatan pembangunan, dengan dukungan sarana dan prasarana digital sebagai fondasi terwujudnya pemerintahan berbasis digital (menpan.go.id, 2025).

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kearsipan, perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik menetapkan peluncuran aplikasi SRIKANDI, yang merupakan aplikasi umum di bidang kearsipan. Pemerintah bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginisiasi pengembangan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Sistem ini dirancang sebagai platform resmi yang digunakan secara nasional untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis di seluruh instansi pusat maupun daerah. Kehadiran SRIKANDI diharapkan dapat menjadi acuan baku dalam tata kelola arsip digital, sekaligus mempercepat terciptanya birokrasi yang lebih efisien.

Pada Biro Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia salah satu unit kerja yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi, termasuk bagian kearsipan. Penerapan pada aplikasi SRIKANDI di lingkungan Biro Umum ini menjadi langkah strategis dalam menunjang tugas dan fungsi Kementerian Hukum, terutama dalam memastikan kelancaran informasi serta penyimpanan dokumen secara terstruktur. Dengan adanya sistem elektronik

aplikasi SRIKANDI, diharap pengelolaan menjadi lebih mudah, terintegrasi, serta menunjang kerja pegawai.

Implementasi sistem baru tidak selalu berjalan mulus, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI, terutama pada Biro Umum diantaranya kesiapan sumber daya manusia yang harus beradaptasi dengan teknologi digital, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta budaya kerja birokrasi yang masih terbiasa dengan sistem manual. Faktor-faktor ini berpotensi mempengaruhi tingkat kemudahan dan kenyamanan pegawai dalam memanfaatkan aplikasi. Hal tersebut didukung oleh Hutapea & Syarvina, (2022) yang menyatakan bahwa walaupun penggunaan arsip digital memberikan kemudahan dalam hal akses, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, beberapa di antaranya meliputi keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknologi, belum meratanya ketersediaan infrastruktur jaringan, serta tingginya biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan perawatan sistem.

Penelitian ini dilakukan pada Biro Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia yang merupakan instansi pemerintahan unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan layanan administrasi umum. Lingkup tugasnya mencakup pengelolaan tata usaha, pengarsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, serta layanan penunjang lainnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewajiban utama Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, Biro Umum berperan strategis dalam mendukung

kelancaran pelaksanaan fungsi pokok kementerian, khususnya pada bidang kearsipan. Sejalan dengan moderisasi administrasi pemerintahan, Kementerian Hukum telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi kearsipan elektronik. Sistem ini memberikan kemudahan dalam pencatatan, penyimpanan, temu kembali, hingga distribusi dokumen, sehingga kegiatan administrasi dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan.



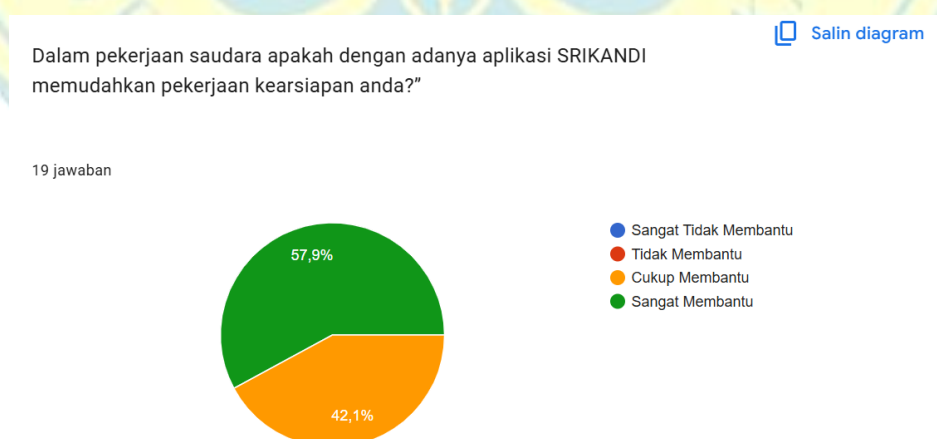
Gambar 1.1 Penggunaan Aplikasi SRIKANDI KEMENKUM 2025

Sumber: KEMENKUM (2025)

Pada gambar diatas 1.1 dapat disimpulkan bawah aplikasi SRIKANDI sangat membantu dalam pekerjaan para pegawai Kementerian Hukum yang dimana seharusnya target dalam 1 tahun 16.400 berkas. Kementerian Hukum serta Kantor Wilayah Hukum dari sabang hingga merauke telah merealisasikan hingga bisa melebihi target yang ditentukan yaitu 70.588 berkas. Dengan adanya SRIKANDI tercapainya target kinerja Kementerian Hukum dalam layanan kearsipan yang didalamnya berupa digitalisasi arsip, berupa

penggunaan aplikasi SRIKANDI. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Biro Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia di temukan bahwa aplikasi SRIKANDI sangat menunjang pekerjaan para pegawai tetapi belum optimal, seperti sering sekali terjadinya *error* pada sistem saat menggunakan aplikasi, kurangnya pemahaman pegawai pada penggunaan sistem elektronik aplikasi SRIKANDI, sehingga kurang efisien dalam waktu dan perlu adanya pembelajaran lanjutan untuk para pegawai dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Dalam hal ini penulis melakukan pra-riset dengan menyebarkan kuesioner mengenai pengalaman para pegawai dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI kepada para pegawai Biro Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperkuat hasil wawancara terkait kemudahan sistem kearsipan elektronik aplikasi SRIKANDI. Peneliti melakukan pra-riset dengan jumlah responden sebanyak 19 orang. Hasil pra-riset tersebut dinyatakan dalam bentuk diagram pada gambar 1.2 berikut ini:



Gambar 1.2 Pra-Riset Dalam pekerjaan saudara apakah dengan adanya aplikasi SRIKANDI memudahkan pekerjaan kearsipan anda?

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

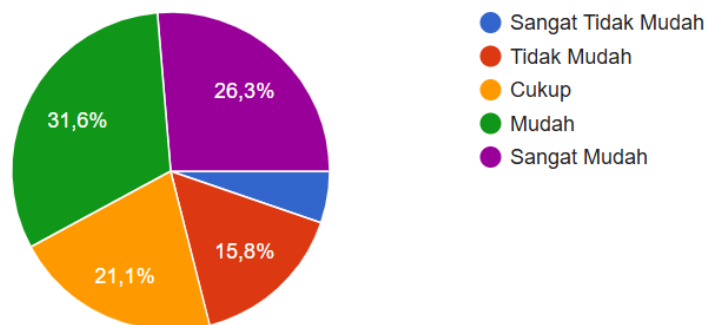
Berdasarkan diagram tersebut dari sebanyak 19 pegawai dapat diketahui bahwa 57,9% menyatakan “Sangat Membantu” dan 42,1% “Cukup Membantu”. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai di Biro Umum merasakan manfaat penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam mendukung pekerjaan kearsipan. dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI di Biro Umum telah berjalan dengan baik, karena memberikan dampak positif bagi efektivitas dan efisiensi pekerjaan pegawai.

Peneliti mengadakan pertanyaan lain dalam pra-riset mengenai seberapa mudah penggunaan aplikasi SRIKANDI pada Biro Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia dapat dilihat pada diagram gambar 1.3 Berikut :

2. Seberapa mudah penggunaan aplikasi *SRIKANDI* dalam pengelolaan kearsipan elektronik?

[Salin diagram](#)

19 jawaban



Gambar 1.3 Pra-riset Seberapa Mudah Menurut Anda Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam Pengelolaan Arsip Elektronik

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan diagram diatas 1.3 disebutkan bahwa sebanyak 19 pegawai memiliki pengalaman berbeda saat menggunakan aplikasi

SRIKANDI dimana 15,8 % menyatakan “jawaban tidak mudah” 21,1% “Cukup” 31,6% “Mudah” dan 26,3% “Sangat Mudah”. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah merasakan kemudahan dalam menggunakan aplikasi SRIKANDI. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemudahan penggunaan aplikasi di lingkungan Biro Umum sudah tergolong baik dan mendekati optimal. Masih terdapat sebagian kecil pegawai yang menghadapi kendala dalam pengoperasian aplikasi. Diperlukan adanya upaya lanjutan, seperti penyelenggaraan pelatihan atau pendampingan, agar penggunaan aplikasi SRIKANDI dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh pegawai. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual. Secara ideal aplikasi SRIKANDI diharapkan mampu memberikan kemudahan penggunaan yang merata bagi seluruh pengguna. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan hambatan teknis maupun non teknis yang berpotensi memengaruhi tingkat kemudahan penggunaan aplikasi.

Penelitian mengenai sistem kearsipan elektronik, khususnya yang berbasis aplikasi SRIKANDI, telah banyak dilakukan sebelumnya. Setiap penelitian tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi tema yang diangkat, metode penelitian yang digunakan, objek maupun subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data yang diterapkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aihunan et al., (2025) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan sistem kearsipan berbasis digital secara nyata berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengelolaan arsip. Hal tersebut sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Simbolon et al., (2024) yang memiliki hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan kearsipan digital di SMK Gelora Jaya Nusantara Medan memberikan dampak positif terhadap kinerja administrasi. Sistem ini terbukti mampu mempercepat proses operasional, menekan pengeluaran yang biasanya diperlukan untuk penyimpanan arsip fisik, serta memperkuat akses dan perlindungan terhadap dokumen yang dikelola.

Penelitian tersebut juga sama dengan kajian yang dilakukan oleh Saefulrahman et al., (2025) yang membahas terkait implementasi dengan hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa penggunaan aplikasi SRIKANDI di Kota Bandung berpotensi memperbaiki efektivitas serta keterbukaan dalam pengelolaan arsip. Proses implementasinya masih dihadapkan pada beberapa hambatan, kendala-kendala tersebut terutama berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai, kebutuhan adaptasi terhadap teknologi baru, serta keterbatasan alokasi anggaran. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya standar pengelolaan arsip nasional menjadi pijakan strategis yang mendukung optimalisasi sistem ini.

Sementara itu perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aihunan et al., (2025); Saefulrahman et al., (2025); Simbolon et al., (2024). Penelitian ini diambil untuk mencari informasi tentang SRIKANDI, dengan banyak judul sebelumnya yang mengkaji terkait implementasi dan analisis saja, hal tersebut belum diketahui apakah Aplikasi

SRIKANDI tersebut memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan kearsipan. Penelitian ini membahas mengenai kemudahan sistem aplikasi SRIKANDI untuk melihat sejauh mana aplikasi ini dapat mendukung administrasi dan tata kelola arsip di lingkungan pemerintah, termasuk pada Biro Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus serta teknik pengumpulan data yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi dari penelitian sebelumnya dengan menghadirkan analisis yang lebih kontekstual dan mendalam.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kemudahan sistem kearsipan elektronik pada instansi terkait, dengan menetapkan judul yaitu **“Studi Kasus Kemudahan Sistem Kearsipan Elektronik Berbasis Aplikasi Srikandi Pada Lingkup Biro Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Kearsipan Elektronik Aplikasi SRIKANDI Pada Biro Umum Kementerian Hukum RI ?
2. Bagaimana Sistem Aplikasi SRIKANDI Memberikan Kemudahan Pada Biro Umum Kementerian Hukum RI ?
3. Bagaimana Hambatan Penggunaan Sistem Kearsipan Elektronik Aplikasi SRIKANDI Pada Biro Kementerian Hukum RI ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan agar jawaban atas permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya mampu ditemukan, Tujuan yang ingin diraih dari adanya penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui Pengelolaan Sistem Pengarsipan Elektronik Aplikasi SRIKANDI Pada Biro Umum Kementerian Hukum RI.
2. Mengetahui Kemudahan Sistem Aplikasi SRIKANDI Pada Biro Umum Kementerian Hukum RI.
3. Mengetahui Hambatan Penggunaan Sistem Kearsipan Elektronik Aplikasi SRIKANDI Pada Biro Umum Kementerian Hukum RI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti baik dari sisi pengembangan teori maupun penerapan praktis. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan, memperkaya pengetahuan, serta berguna nyata bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik di lingkungan akademik maupun instansi pemerintahan

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman konseptual di bidang administrasi. khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem pengarsipan elektronik di lingkungan pemerintahan melalui penggunaan Aplikasi SRIKANDI.

- b. Secara ilmiah, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur dan referensi akademik tentang kemudahan sistem informasi kearsipan digital, terutama dalam kaitannya dengan efisiensi kerja birokrasi dan peningkatan kualitas layanan administrasi.
- c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik melakukan kajian serupa tentang sistem kearsipan elektronik, digitalisasi arsip, maupun inovasi teknologi di sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan sistem kearsipan elektronik, serta meningkatkan optimalisasi penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan administrasi.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana pengembangan kemampuan akademik, penerapan ilmu yang telah dipelajari selama studi, serta pemenuhan salah satu syarat kelulusan program sarjana.

c. Bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi referensi ilmiah di lingkungan fakultas, terutama bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik menelusuri topik terkait transformasi digital dalam administrasi publik dan manajemen kearsipan.